

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

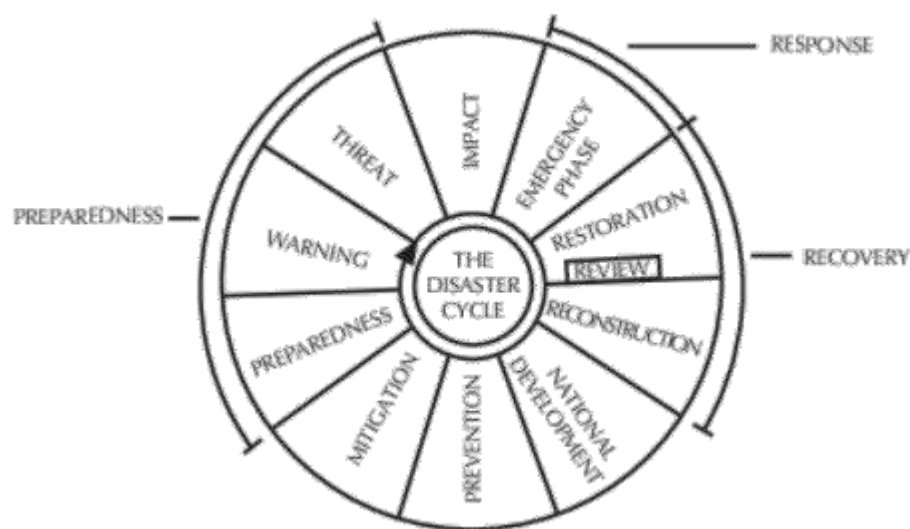
Pada bagian ini diuraikan berbagai teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan mengenai kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Merapi pada masa pandemi Covid-19. Berbagai teori telah diperoleh dari sumber-sumber referensi, diantaranya:

2.1.1. Teori Manajemen Bencana

Kemunculan dari pendidikan manajemen bencana bertujuan untuk mengatasi dan memecahkan permasalahan kebencanaan yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan suatu kehidupan. Alam dan tindakan manusia dapat menyebabkan terjadinya suatu bencana sehingga perlu upaya penanggulangan dan penanganan yang bersifat cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi dengan menggunakan cara-cara terstruktur melalui manajemen bencana. UNISDR (2009) menjabarkan bahwa manajemen bencana merupakan suatu proses secara sistematis dengan menggunakan arahan administratif, organisasi, dan ketrampilan, serta kapasitas operasional untuk menerapkan strategi, kebijakan, dan meningkatkan kapasitas penanggulangan untuk mengurangi dampak merugikan dan kemungkinan yang terjadi akibat dari bahaya bencana.

Manajemen bencana disebut sebagai ilmu terapan oleh Carter (2008) yang mana dalam bentuk kegiatan observasi sistematis dan tindakan analisis pada suatu bencana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan persiapan dari terbentuknya rencana dan menyusun cara dalam menghadapi bencana yang akan atau sudah datang. Carter membagi tahapan manajemen bencana menjadi 5 macam, yaitu

pencegahan, mitigasi, kesiapan, tanggap darurat, dan pemulihan. Secara lebih mendalam, Carter menggambarkan manajemen bencana dalam bentuk lingkaran dengan alasan bahwa setiap terjadinya bencana yang terjadi selanjutnya dapat menjadi pembelajaran bagi pelaksanaan manajemen bencana berikutnya.



Gambar 2.1 Lingkaran Manajemen Bencana

Sumber: Carter (2008)

Prevention atau pencegahan dilaksanakan sebagai awal mula manajemen bencana yaitu ketika suatu bencana belum terjadi. Tahap ini bertujuan untuk menghindari potensi dari adanya dampak buruk bencana melalui tindakan yang diambil sebelum bencana datang. Selanjutnya, tahap *mitigation* adalah suatu upaya dalam mengurangi dan membatasi dampak merugikan dari bahaya bencana yang tak dapat dicegah. Sering kali dampak buruk bencana sulit untuk sepenuhnya dicegah, namun dengan adanya mitigasi maka besarnya dampak yang ditimbulkan dapat ditekan dengan berbagai strategi dan tindakan.

Tahapan khusus terbagi atas 3 bagian yaitu *preparedness* (kesiapsiagaan), *response* (tanggap darurat), dan *recovery* (pemulihan). Tahap pertama, kesiapsiagaan adalah upaya yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat untuk dapat secara cepat melakukan upaya pengendalian pada saat situasi darurat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan pengetahuan dan kapasitas baik kepada pemerintah, organisasi, tenaga ahli, masyarakat, dan individu untuk dapat mengantisipasi, merespon, dan pulih dari dampak bencana. Tahap kedua, tanggap darurat merupakan tindakan yang harus segera dilakukan ketika bencana terjadi. Umumnya, fase ini lebih mengarah pada tindakan penyelamatan dan perlindungan, serta mengenai upaya bagaimana korban terdampak dapat melewati segala gangguan dan dampak buruk dari bencana.

Setelah fase tanggap darurat selesai, maka selanjutnya tahap pemulihan dilaksanakan sebagai upaya untuk mengembalikan keadaan di kawasan terdampak bencana seperti sedia kala ketika bencana belum menerjang. Kondisi kehidupan masyarakat dipulihkan melalui perbaikan saran dan prasarana umum, bantuan perbaikan hunian, termasuk juga dalam bidang sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat. Tahap ketiga inilah yang mendasari pembentukan lingkaran manajemen bencana milik Carter. Dikarenakan dalam tahap pemulihan terdapat proses peninjauan ulang kerusakan yang mana akan menjadi patokan persiapan untuk menghadapi bencana berikutnya yang termasuk dalam tahap mitigasi dan pencegahan.

Sejalan dengan Carter, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang penanggulangan bencana, manajemen bencana terbagi dalam tiga tahap yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana yang dijelaskan dalam pasal 33. Tahap prabencana adalah situasi ketika belum atau berpotensi terjadinya bencana. Upaya-upaya yang dapat dilakukan seperti perencanaan,

pengurangan risiko, dan pencegahan. Tahap tanggap darurat merupakan berbagai macam kegiatan yang terstruktur dan segera dilaksanakan ketika bencana terjadi dengan tujuan dampak buruk yang ditimbulkan. Kegiatan tersebut meliputi 1) penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda; 2) pemenuhan kebutuhan dasar; 3) perlindungan dan penanganan pengungsi; 4) penyelamatan dan pemulihan prasarana dan sarana. Tahap ketiga yaitu pascabencana adalah upaya mengembalikan keadaan seperti semula yang terdiri atas tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi (UU No 24 Tahun 2007).

Berdasarkan tinjauan teori diatas, peneliti menggunakan teori manajemen bencana milik Carter yang mana dijabarkan fase kesiapsiagaan menjadi tahap awal untuk mengelola bencana. Kesiapsiagaan berperan penting dalam sistem pengendalian bencana yang nantinya akan terjadi pada situasi darurat.

2.1.2. Teori Kesiapsiagaan Bencana

Istilah 'kesiapan' menggambarkan kemampuan untuk merespon dengan cepat dan tepat bila diperlukan. Hal ini pula yang harus diterapkan ketika menghadapi bencana yang dapat datang sewaktu-waktu. Manajemen bencana mengenal tiga tahapan bencana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, meliputi pra bencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Menurut Coppola & Maloney (2009), kesiapsiagaan merupakan salah satu komponen dari pra bencana yang berfungsi untuk meminimalkan dampak bahaya bencana melalui tindakan pencegahan yang efektif. Pelibatan orang-orang terhadap upaya ini termasuk para korban yang terdampak ataupun orang yang dapat membantu korban dengan menggunakan alat yang dapat meningkatkan kemampuan bertahan hidup dan meminimalkan kerugian finansial serta kerugian lainnya. Hal ini dapat dicapai dengan

melatih dan melengkapi lembaga tanggap darurat di setiap tingkat pemerintahan dan mendidik masyarakat tentang tindakan apa yang dapat mereka ambil untuk mengurangi kerentanan dan risiko. Tujuan dari kesiapsiagaan adalah: 1) mengetahui apa yang harus dilakukan setelah bencana; 2) mengetahui metode yang harus dilakukan; 3) mengetahui alat yang tepat untuk melakukannya secara efektif. Pengetahuan dan kapasitas berperan penting untuk dikembangkan dalam lingkup pemerintah, organisasi terkait, dan masyarakat untuk secara efektif mengantisipasi, merespon, dan pulih dari dampak bencana (UNISDR, 2009).

Pandangan kedua dari Brown (2013) menjelaskan bahwa kesiapsiagaan bencana digambarkan sebagai tindakan yang dirancang untuk meminimalkan hilangnya nyawa dan dampak kerusakan. Selain itu juga sebagai pengatur dan pemberi fasilitas untuk rencana penyelamatan, pemberian bantuan, dan rehabilitasi yang tepat waktu serta efektif dalam kasus bencana. Upaya ini didukung oleh peraturan perundang-undangan yang diperlukan dan sarana kesiapan untuk menghadapi situasi bencana atau keadaan darurat serupa yang tidak dapat dihindari. Brown menekankan bahwa kesiapsiagaan berkaitan erat dengan beberapa komponen, yaitu: 1) peramalan dan peringatan; 2) pendidikan dan pelatihan penduduk; 3) organisasi dan pengelolaan situasi bencana, yang termasuk persiapan rencana operasional, pelatihan kelompok relawan, pengumpulan logistik, dan alokasi dana yang diperlukan.

Dalam lingkup kebijakan Indonesia, kesiapsiagaan telah tertera pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang panduan penilaian kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Kesiapsiagaan berperan dalam upaya pengkajian kapasitas daerah yang mengacu pada penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penentuan keberhasilan pengurangan risiko bencana. Pada Undang-Undang tersebut, kesiapsiagaan diartikan sebagai suatu bentuk upaya yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan

menghilangkan berbagai macam ancaman bencana melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan individu, masyarakat, dan pemerintah. Dari hasil ratifikasi Kerangka Aksi Hyogo yang disepakati oleh lebih dari 160 negara, maka dihasilkan 5 prioritas dan 22 indikator pencapaian yang mana salah satu prioritasnya adalah mengenai kesiapsiagaan. Prioritas kelima berbunyi “Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat.” Dari kebijakan tersebut terdapat 4 (empat) indikator yang meliputi:

- a. Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya
- b. Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana
- c. Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pascabencana
- d. Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pascabencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat

Cakupan teori kesiapsiagaan memiliki 3 (tiga) lingkup pembahasan, hal ini dijelaskan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang bekerja sama dengan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dalam tulisan Sopaheluwakan (2006), yaitu (Widodo, 2017):

- a. Kesiapsiagaan individu dan rumah tangga, di dalamnya meliputi pengetahuan bencana, rencana tanggap darurat, sistem peringatan, mobilisasi sumber daya, dan tingkat kesiapsiagaan.

- b. Kesiapsiagaan pemerintah, di dalamnya meliputi pengetahuan bencana, kebijakan dan panduan, rencana tanggap darurat, fasilitas kritis, sistem peringatan, kemampuan memobilisasi sumber daya, dan tingkat kesiapsiagaan.
- c. Kesiapsiagaan komunitas, di dalamnya meliputi pengetahuan bencana, kebijakan dan arahan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan, kemampuan memobilisasi sumber daya, dan tingkat kesiapsiagaan.

Berdasarkan tinjauan mengenai teori kesiapsiagaan dari beberapa ahli di atas, peneliti menggunakan teori Sopaheluwakan dengan fokus pada kesiapsiagaan pemerintah yaitu pemerintah Kabupaten Magelang. Hal ini diperkuat dengan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang panduan penilaian kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, yang mana memiliki indikator-indikator untuk menilai kesiapsiagaan.

2.1.3. Konsep Keamanan Nasional

Definisi keamanan menjelaskan suatu situasi aman yang berarti keadaan bebas dari berbagai ancaman bahaya, rasa cemas, dan takut (Anggoro, 2003). Hal ini menunjukkan bahwa konsep keamanan tidak hanya merujuk pada satu bidang saja. Perkembangan studi keamanan berawal dari tahun 1980-an ketika puncak Perang Dingin yang menghasilkan definisi bahwa keamanan adalah semata-mata hanya bersifat kemiliteran. Namun, pasca Perang Dingin usai dan memberi dampak pada aspek-aspek kehidupan lainnya, konsep keamanan menjadi lebih fleksibel. Lingkup keamanan menjadi lebih luas, dari global, regional, tingkat negara, hingga tingkat individu manusia (Setiawan, 2017).

Sejalan dengan Buzan (2008), dirinya menjelaskan bahwa konsep keamanan dapat dianalisis pada semua tingkat kehidupan, yaitu dari individual, nasional, internasional, termasuk sistem regional maupun yang

lebih luas. Maka dari itu, dimensi yang dicakup akan menyeluruh ke semua sektor kehidupan seperti dimensi militer, sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Buzan juga menambahkan bahwa dua komponen tersebut, tingkat analisis dan dimensi keamanan, harus diintegrasikan untuk menghasilkan konsep keamanan yang mudah untuk dipahami.

Dalam paradigma kenegaraan, situasi aman memiliki penyebutan khusus yaitu keamanan nasional. Secara umum, Darmono (2010) mengartikannya sebagai penggunaan kekuatan militer, politik, dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar suatu bangsa dalam usahanya menjaga dan melindungi kepentingan nasionalnya dari ancaman yang datang dari dalam dan luar. Keamanan nasional juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan militer, politik, ekonomi, dan diplomasi atas usahanya dalam mempertahankan keberadaan negaranya.

Pada perspektif Negara Indonesia, konsep keamanan nasional telah menjadi aspek esensial dalam jati diri bangsa. Buku Putih Pertahanan Indonesia menjabarkan bahwa pembentukan atau perumusan keamanan nasional harus didasari oleh kepentingan nasional dan strategi yang tepat sehingga menciptakan kondisi yang stabil bagi pelaksanaan pembangunan nasional demi terwujudnya tujuan nasional Indonesia (Kemhan, 2015). Dinamika situasi lingkungan strategis yang berubah-ubah membuat konsep keamanan nasional bersifat dinamis. Hal ini disebabkan pula oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam negeri, seperti pendidikan, politik, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Lingkup cakupan keamanan nasional juga merambah sampai aspek bencana alam yang masuk pada kategori ancaman nyata. Keadaan geografis Indonesia yang termasuk dalam lintasan cincin api Pasifik perlu mendapatkan perhatian karena ancaman bencana alam yang membuat kawasan Indonesia menjadi rawan terhadap bencana. Sejalan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan konsep keamanan nasional dari Buzan

yang mana terwujudnya keamanan nasional dapat berasal dari seluruh aspek kehidupan, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu adalah kajian mengenai produk-produk tulisan akademis dari berbagai sumber yang berguna bagi peneliti dalam membantu mengetahui permasalahan penelitian, mengecek keaslian masalah penelitian, memperluas wawasan mengenai topik yang dianalisis, memberikan gambaran kerangka berpikir, membantu menyusun asumsi awal, dan mempertajam analisis. Beberapa tulisan akademis relevan yang menjadi rujukan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian oleh Devi Erlia dengan judul **Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat dan Pemerintah Menghadapi Bencana Banjir di Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar** yang diterbitkan oleh Jurnal Pendidikan Geografi pada bulan Mei 2017. Penelitian berfokus kepada dua objek yang diteliti adalah masyarakat dan pemerintah di Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar. Dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, peneliti menganalisis kesiapsiagaan pada saat menghadapi bencana banjir melalui lima indikator, yaitu 1) pengetahuan dan sikap terhadap bencana; 2) rencana tanggap darurat; 3) sistem peringatan dini; 4) sumber daya mendukung; 5) modal sosial. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah berada pada tingkat sedang. Kemudian bila digabungkan, Kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah juga berada pada tingkat sedang (Erlia et al., 2017).
- b. Penelitian oleh Kukuh Serio Utomo dengan judul **Kajian Kesiapsiagaan terhadap Bencana Tsunami di Kecamatan**

Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Jurnal *GeoEco* pada bulan Januari 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan spasial. Peneliti berfokus pada tiga lingkup kesiapsiagaan yaitu individu, masyarakat sekolah, dan pemerintah. Dari hasil teknik sampel *area probability* yang dilakukan menunjukkan bahwa Kesiapsiagaan pada individu masuk dalam kategori siap pada nilai indeks rata-rata 68,25. Yang kedua, kesiapsiagaan masyarakat sekolah berada dalam kategori siap pada nilai indeks rata-rata 68,25. Dan yang ketiga, Kesiapsiagaan pemerintah berada pada kategori siap di nilai indeks rata-rata 68,25. Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan, di lingkup individu dilakukan dengan sosialisasi dan simulasi. Kemudian di lingkup sekolah dilakukan dengan penerapan pengetahuan tentang kebencanaan sebagai materi pembelajaran. Sementara itu di lingkup pemerintah dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (Utomo et al., 2018).

- c. Penelitian oleh Septian Aji Permana dengan judul **Community Based Mount Merapi Eruption Disaster Management** yang diterbitkan oleh *Psychology and Education Journal* pada bulan Desember 2020. Penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana masyarakat Cangkringan dalam mengelola sumber daya alam yang diperolehnya dari letusan Merapi dan menemukan sistem perekonomian berdasarkan otonomi daerah. Diketahui bahwa masyarakat Cangkringan menggunakan unsur kearifan lokal untuk mengelola perekonomian pascabencana Merapi melalui pembukaan badan usaha yaitu koperasi (Permana et al., 2021). Pembentukan koperasi pada tahun 2008 bertujuan untuk memberikan dana kepada masyarakat agar tidak lagi bergantung pada investor asing. Hingga saat ini, koperasi tidak

hanya menangani permasalahan penambangan pasir dan batu tetapi juga lebih luas di bidang pariwisata dan pemasaran mikro seperti penyediaan tempat jual beli. Hal ini sebagai bentuk simpan pinjam yang melegalkan informasi notaris dan kantor dari Kecamatan Cangkringan.

- d. Penelitian oleh Spyridon Mavroulis dengan judul **The March 2021 Thessaly Earthquakes and Their Impact Through the Prism of a Multi-Hazard Approach in Disaster Management** yang diterbitkan pada oleh Bulletin of the Geological Society of Greece pada bulan Juli 2021. Penelitian ini berfokus pada penanganan bencana gempa bumi yang terjadi Thessaly pada bulan Maret 2021 yang bersamaan dengan terjadinya pandemi Covid-19. Pengelolaan pascabencana gempa bumi tersebut telah dilakukan tindakan yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 melalui prisma pendekatan multi-ancaman terhadap manajemen bencana dan dampaknya (Mavroulis et al., 2021). Upaya-upaya yang diterapkan antara lain: tempat penampungan darurat yang mencegah kepadatan manusia, proses distribusi persediaan darurat yang disesuaikan untuk mencegah penularan melalui kontak fisik, penyediaan tempat identifikasi dan isolasi kasus *suspect* Covid-19 yang lebih luas, dan pegujian skrining secara rutin terhadap penduduk setempat untuk mendeteksi virus SARS-CoV-2. Dari analisis laporan harian kasus Covid-19 di wilayah terdampak gempa pada masa pra dan pascabencana ditemukan bahwa kasus tidak mengalami lonjakan meskipun kondisi multi ancaman bencana belum pernah terjadi sebelumnya.
- e. Penelitian oleh Sri Heryati dengan judul **Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana** yang diterbitkan oleh Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik pada bulan Agustus 2020. Penelitian membahas mengenai peran

pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana dan faktor-faktor yang menghambatnya untuk mewujudkan tujuan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima aspek pada peran pemerintah dalam upayanya menanggulangi bencana, antara lain legislasi, kelembagaan, perencanaan, pendanaan, dan pengembangan kapasitas (Heryati, 2020). Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tingkat daerah merupakan langkah strategis yang telah dicapai untuk mengatasi risiko dan dampak bencana alam yang berguna sebagai garda terdepan dalam terselenggaranya penanggulangan bencana. Selanjutnya, diketahui pula hampir pada setiap daerah memiliki hambatan yang sama untuk mewujudkan upaya penanggulangan bencana, antara lain sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan koordinasi yang lemah antar sektor.

Lima penelitian di atas merupakan produk tulisan akademis yang memiliki relevansi terhadap tesis yang disusun oleh peneliti. Relevansi penelitian secara umum terdapat pada persamaan kajian mengenai penanggulangan bencana dan secara khusus terdapat pada kajian mengenai kesiapsiagaan bencana, erupsi gunung Merapi, pandemi Covid-19, dan peran pemerintah dalam penanggulangan bencana. Lima penelitian tersebut ditampilkan kembali dalam bentuk tabel untuk memudahkan dalam mendeteksi relevansi melalui perbandingan hasil, persamaan, dan perbedaan penelitian dengan tesis peneliti.

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

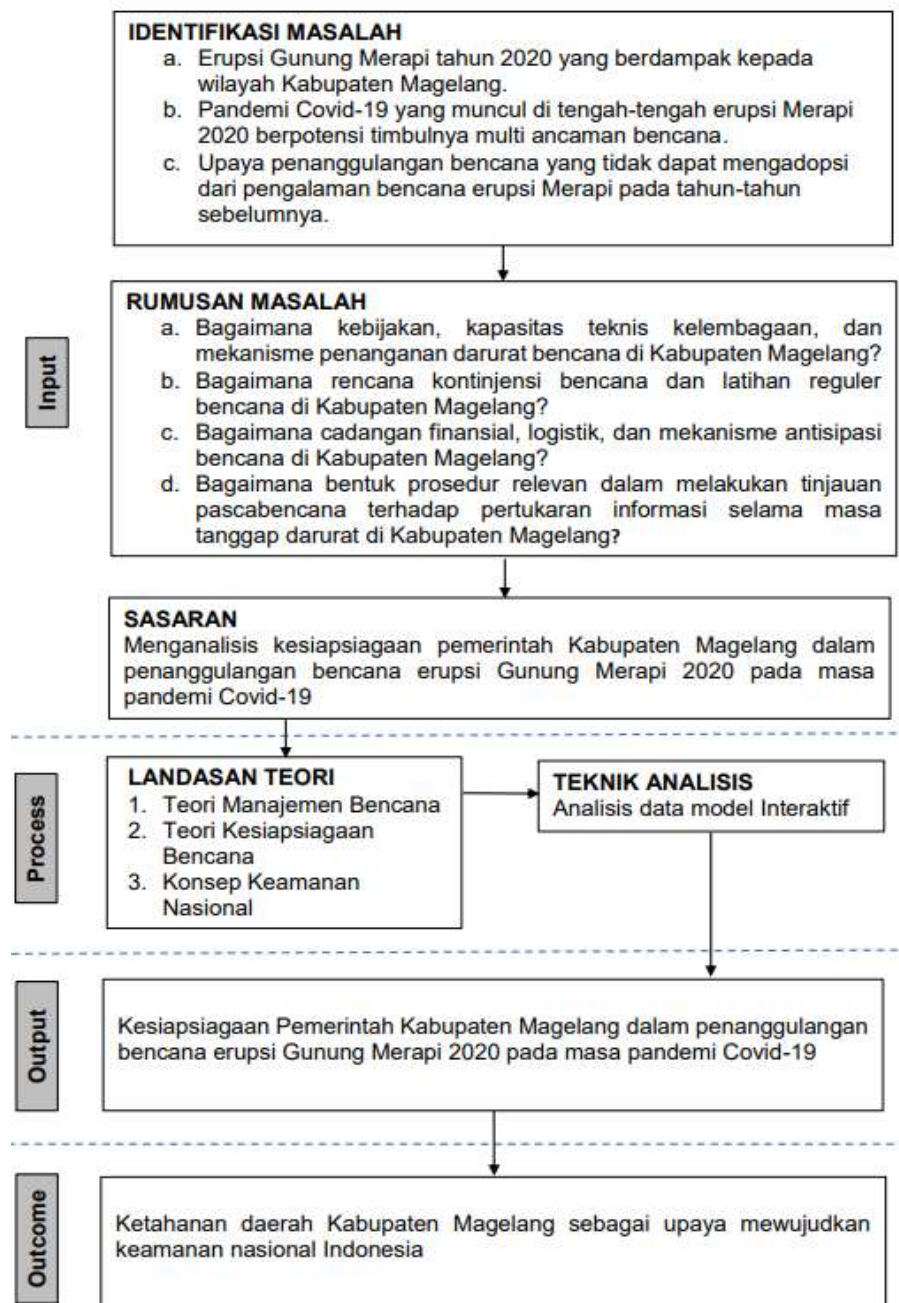
No	Peneliti. (Tahun). Judul.	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Devi Erlia, Rosalina Kumalawati, Nevy Farista Aristin. (2017). <i>Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat dan Pemerintah Menghadapi Bencana Banjir di Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar</i>	Tingkat Kesiapsiagaan dinilai dengan menggunakan lima indikator yaitu 1) pengetahuan dan sikap terhadap bencana; 2) rencana tanggap darurat; 3) sistem peringatan dini; 4) sumber daya mendukung; 5) modal sosial. Hasilnya tingkat kesiapsiagaan dari masyarakat maupun pemerintah berada pada tingkat sedang. Begitu pula bila keduanya digabungkan maka menghasilkan tingkat kesiapsiagaan yang sedang.	Penelitian menggunakan teori Kesiapsiagaan dengan objek pemerintah	Metode penelitian menggunakan kuantitatif dengan fokus objek penelitian menambahkan komponen masyarakat.
2	Kukuh Setio Utomo, Chatarina Muryani, Setya Nugraha. (2018). <i>Kajian Kesiapsiagaan terhadap Bencana Tsunami di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2016.</i>	Tiga lingkup Kesiapsiagaan yang diteliti adalah individu, masyarakat sekolah, dan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiganya masuk dalam kategori siap. Upaya kesiapsiagaan yang dilakukan masing-masing sebagai berikut: 1) individu: sosialisasi dan simulasi; 2) masyarakat sekolah: menerapkan pengetahuan kebencanaan dalam materi pembelajaran; 3) pemerintah: sosialisasi pada masyarakat dan koordinasi dengan pihak terkait.	Teori kesiapsiagaan sama-sama mengambil dari pedoman LIPI.	Pedoman LIPI yang digunakan berfokus pada ketiga lingkup kesiapsiagaan, yaitu individu, masyarakat, dan pemerintah.
3	Septian Aji Permana, Supri Hartanto, Ary Purwatiningsih, dan Mohammad Maulana Magiman. (2020). <i>Community Based Mount Merapi Eruption Disaster Management</i>	Aspek kearifan lokal digunakan untuk mengelola perekonomian pascabencana Merapi melalui pembukaan badan usaha yaitu koperasi. Pembentukan koperasi bertujuan untuk memberikan dana kepada masyarakat agar tidak bergantung pada investor asing. Keberadaan koperasi bermanfaat sampai pada ranah pariwisata dan pemasaran mikro seperti penyediaan tempat jual beli.	Analisis penanggulangan bencana pada ancaman bencana erupsi Gunung Merapi	Analisis penelitian berfokus pada penanggulangan bencana erupsi gunung Merapi berbasis komunitas

4	Spyridon Mavroulis, Maria Mavrouli, Panayotis Carydis, Konstantinos Agorastos, dan Efthymis Lekkas. (2021). <i>The March 2021 Thessaly Earthquakes and Their Impact Through the Prism of a Multi-Hazard Approach in Disaster Management</i>	Pengelolaan bencana gempa bumi di Thessaly telah dilakukan tindakan yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 melalui prisma pendekatan multi ancaman terhadap manajemen bencana dan dampaknya. Berkat berbagai macam upaya penyesuaian tersebut menghasilkan data kasus laporan Covid-19 yang tidak mengalami lonjakan kasus dari pra ke pascabencana.	Analisis penanggulangan bencana terhadap ancaman <i>multi-hazard</i> yang mana salah satu dari dua bencana tersebut adalah Covid-19	Analisis penanggulangan bencana pada multi ancaman yang berbeda dari penelitian tesis ini yaitu gempa bumi dan Covid-19 yang berlokasi di Yunani.
5	Sri Heryati. (2020). <i>Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana</i>	Peran pemerintah dalam penanggulangan bencana memiliki lima aspek penting, yaitu legislasi, kelembagaan, perencanaan, dan pengembangan kapasitas. Pembentukan BNPB dan BPBD adalah bentuk langkah strategis yang berperan sebagai garda terdepan terselenggaranya penanggulangan bencana. Hambatan yang hampir pada setiap daerah miliki atas upaya ini adalah SDM, anggaran, sarana prasarana, dan koordinasi antar sektor.	Analisis peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana	Analisis penanggulangan bencana fokus pada ancaman bencana secara umum dan tidak membahas mengenai ketahanan sosial

Sumber: Diolah oleh peneliti (2021)

2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan alur kerangka pemikiran tesis yang dapat dilihat dalam gambar 2.2 berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh peneliti (2021)